



Media: Jawa Pos

Hari: Senin

Tanggal: 09 Agustus 2021

Halaman: 4

JATI DIRI

PPKM dan Wajib Tes PCR

Angka kematian akibat Covid-19 telah melampaui 100 ribu orang. Puluhan ribu orang juga masih berstatus positif terkonfirmasi. Puluhan ribu orang lainnya diprediksi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri tanpa terdeteksi pemerintah. Ratusan ribu orang telah sembuh dari Covid-19, namun masih merasakan dampak kerusakan organ tubuh akibat long Covid.

Pemerintah akhirnya memiliki kesadaran bahwa penanganan pandemi yang menekankan pada perawatan kesehatan akan gagal. Kapasitas rumah sakit memang bisa ditambah dengan cepat melalui rumah sakit darurat. Namun, jumlah dokter dan perawat tidak bisa digelombungkan karena membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencetak dokter dan tenaga medis yang kompeten.

Selain mengencakan vaksinasi, pemerintah perlu melakukan pembenahan di sisi hulu, yakni penelusuran (*tracing*) dan pemeriksaan (*testing*). Pemerintah memang telah menugaskan TNI/Polri menjadi tenaga penjejak (*tracer*). Namun, upaya tersebut diyakini tidak akan mampu menyelesaikan kendala mendasar epidemiologi, yakni kecepatan penularan. Pemerintah perlu mengubah pola *tracing* dengan tidak sekadar mengikuti jejak suatu kasus positif, tapi juga antisipatif dengan melakukan pemeriksaan masif dalam waktu singkat.

PPKM darurat atau level 4 seharusnya menjadi kesempatan untuk memeriksa dengan alat tes yang valid semua warga yang tinggal di wilayah PPKM dan pelintas batas. Tidak sekadar membatasi mobilitas.

Terhadap yang positif, pemerintah harus kembali proaktif dengan mewajibkan karantina di tempat isolasi terkendali. Rencananya kematian diduga disebabkan isolasi mandiri yang dilakukan serampangan.

Kapasitas dan kemampuan pemeriksaan juga harus diperbaiki. Kemenkes telah menargetkan 400 ribu pemeriksaan setiap hari. Namun, kemampuan alat dan personel hanya 100 ribuan hingga 250 ribuan sampel per hari. Keterbatasan kapasitas *testing* ini menyebabkan banyak kasus positif yang tidak terdeteksi sehingga mengakibatkan deret eksponensial kasus positif Covid-19 tidak bisa diputus. Kata kuncinya, bila ingin menurunkan kasus positif, bukan hanya pembatasan mobilitas yang harus dilakukan. Tapi juga peningkatan kapasitas *testing* bagi warga dan kewajiban melakukan *testing* untuk orang yang keluar masuk wilayah PPKM.

Kapasitas tempat karantina juga harus ditingkatkan. Kewajiban menjalankan isolasi mandiri di tempat karantina terpusat harus ditegaskan TNI/Polri dan satgas Covid-19. (*)

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai E
1.	☐ Neg
2.	☐ Pos
3.	☐ Netr
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005